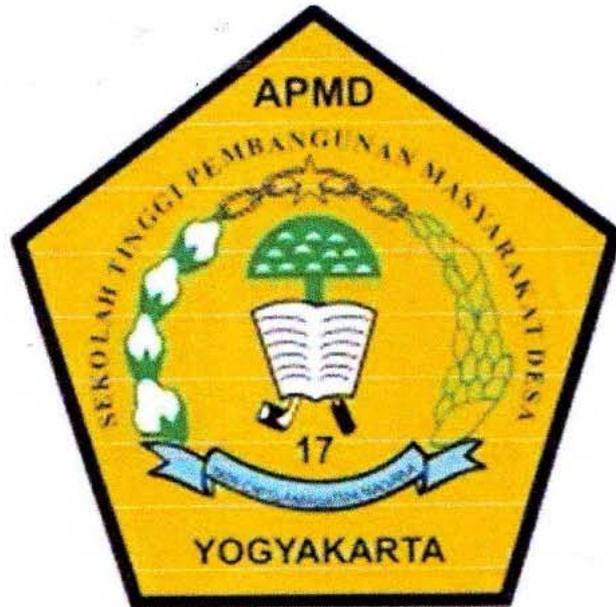


SKRIPSI

**KAPASITAS BIROKRAT LOKAL DI DALAM PEMERINTAHAN
YANG SENTRALISTIK**

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Pemerintah Lokal Municipio Manufahi
Timor Leste)*



Disusun Oleh :

Denizio Magno Ferrão Tilman

12520175

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”**

YOGYAKARTA

2016

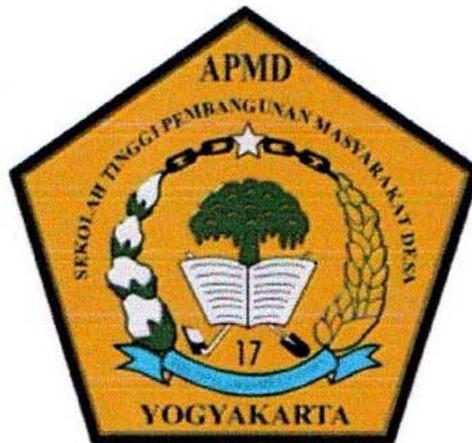


SKRIPSI

**KAPASITAS BIROKRAT LOKAL DI DALAM PEMERINTAHAN
YANG SENTRALISTIK**

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Pemerintah lokal Municipio Mamufahi
Timor Leste)*

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata (S-1) Pada Program Studi Ilmu
Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD” Yogyakarta**



Disusun Oleh :

Denizio Magno Ferrão Tilman
12520175

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PENDIDIKAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2016



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di Depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Pada Hari : Senin
Tanggal : 17 Oktober 2016
Jam : 09.00
Tempat : Ruang Sidang Skripsi

TIM PENGUJI

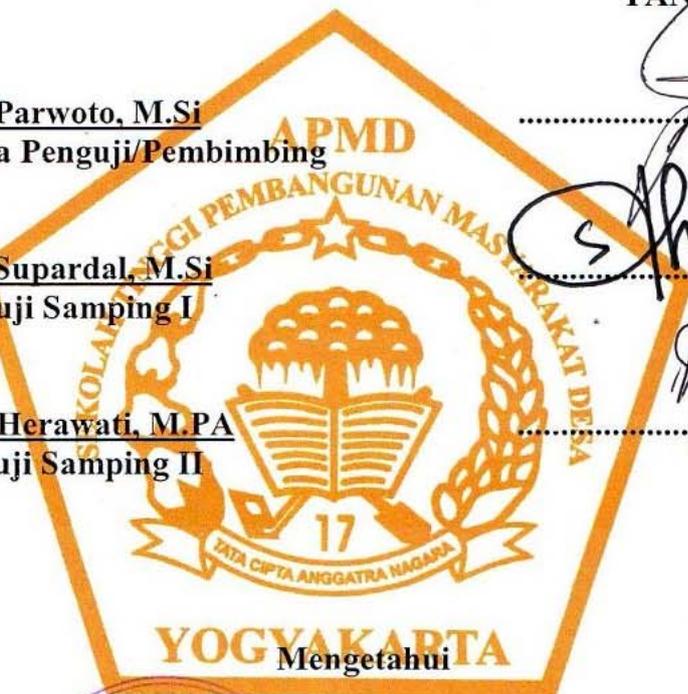
NAMA

TANDA TANGAN

1. Drs. Parwoto, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

2. Drs. Supardal, M.Si
Penguji Samping I

3. Dra. Herawati, M.PA
Penguji Samping II



Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
"APMD"

YOGYAKARTA
2016

MOTTO

MORIS LAO TUIR PROSESU NEBE NAKONU HO TENTASAUN

MAIBE TENKI FIAR AN NAFATIN LAO BA OIN HODI

ATINGI OBJEKTIVO

EM PRINSIPIU HADIA NO SERVI BA POVO NO NASAUN

“DENIZIO MAGNO FERRÃO TILMAN”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh tantangan dan kesabaran akhirnya saya bisa menyelesaikan sebuah karya yang sederhana ini setulusnya ku persembahkan untuk:

Kepada tuhan Yesus Kristus yang telah menganugrakan berkat dan rahmat yang berlimpah dan mengartikan hidup menjadi sebuah kehidupan yang indah.

Kepada ibu dan ayah tercinta Elda da conceicao dan Tobias amaral magno yang telah memberikan nasehat dan dorongannya selama ini.

Kepada gasparstef chrow sahabat yang sudah memberikan motivasi kepada saya.

Kepada teman-teman seperjuangan “Stmpd Apmd” yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada saya dapat menyelesaikan karya ilmiah saya yang sederhana ini.

Kepada bapak Drs. Parwoto, M.si. yang telah sabar membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.

Kepada ibu Dra Herawati, MPA. yang telah memberikan saran/masukan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.

Kepada almamaterku tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kuasanya sehingga saya dapat tersusun skripsi yang berjudul **“Kapasitas Birokrat Lokal Di Dalam Pemerintahan Yang Sentralistik”** Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah dibantu oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada;

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos. M.Si. selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. selaku ketua program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Drs. Parwoto, M.Si selaku Dosen pembimbing
4. Bapak Drs. Supardal, M.Si. selaku Dosen Penguji I
5. Ibu Dra. Herawati, MPA. selaku Dosen Penguji II
6. Sekretaris Pemerintah Lokal Municipio Manufahi beserta Staf yang telah sudi dan berkenan dengan bijaksana memberikan ijin serta bantuannya selama penulis melakukan penelitian dalam rangka pembuatan Skripsi ini..
7. Para Informan yang telah dengan ramah dan terbuka dalam memberikan informasi dan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan data penelitian di Municipio Manufahi.
8. Semua Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang-orang terdekat penulis yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material selama kuliah di STPMD “APMD” terutama untuk ;

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Elda dan conceição Bapak Tobias Amaral Magno atas kasih sayang, doa bimbingan serta dukungan yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Seluruh keluarga besarku, yang telah memberikan doa dan dukungannya.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2012 dan 2013, Terimah kasih atas persahabatan yang tak pernah terlupakan, dukungan serta semangat yang tiada henti kepada penulis.
4. Untuk sahabatku, Gaspar Terimah kasih untuk bantuan dan dukungannya.
5. Ibu yohana (Ibu dukuh wates) terimah kasih atas doa dan dukungannya.
6. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelancaran penyusunan tugas penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, Oktober 2016

Penyusun

Denizio Magno Ferrão Tilman

ABSTRAK

Sesuai dengan permasalahan yang disinyalir melekat dalam birokrat rendahnya kapasitas inovasi dan kreatif, selama ini birokrat dianggap tidak mempunyai peluang dan kemampuan untuk cepat tanggap terhadap perubahan permasalahan sosial yang harus dipecahkan, dalam posisi ini peran birokrat sangatlah jauh dari nuansa sebagai pelayan masyarakat, mereka lebih menunjukkan semangat bergantung ke atas dari pada berakar ke bawa, tidak jauh berbeda dengan kontroversi yang dikemukakan di atas, lemahnya kapasitas birokrat pemerintah tersebut, terjadi ketidakpercayaan publik yang sangat besar terhadap pemerintah karena kondisi pemerintah sekarangpun juga sedang kembang kempis mencari dana untuk keperluan dan kepentingan mereka sebagai jalan melanggengkan kekuasaanya, bagaimana mau menyelenggarakan pemerintahan dengan baik manakala kondisi politis masih sangat kacau dan selalu berpihak pada penguasa. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Kapasitas Birokrat Lokal Di Dalam Pemerintahan Yang Sentralistik di MUNICIPIO MANUFAHI TIMOR LESTE. yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kapasitas Birokrat Lokal di dalam Pemerintahan Yang Sentralistik.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kapasitas Birokrat Pemerintah Lokal MUNICIPIO MANUFAHI, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik, observasi wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, penilaian data dan interpretasi data, informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari administrator, birokrat, karangtaruna, Ngo, veteran, dan tokoh masyarakat.

Dari hasil penelitian tentang kapasitas birokrat lokal di dalam pemerintahan yang sentralistik di pemerintah lokal MUNICIPIO MANUFAHI TIMOR LESTE, perlu meningkatkan kapasitas birokrat untuk mendapatkan suatu pemahaman yang cukup tentang administrasi pemerintahan supaya bisa memahami tugas dan fungsinya secara benar, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan masyarakat, pelayanan dan pembangunan, dan memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan efektif dan efisiensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik sekaligus mampu menekan interes personal, memcerminkan kemampuan untuk merumuskan masalah dan menawarkan solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat penelitian	9
1. Tujuan penelitian.....	9
2. Manfaat penelitian.....	9
D. Kerangka Teori	10
1. Kapasitas Birokrat lokal.....	10
a. Kapasitas.....	10
b. Birokrat.....	15
c. Lokal.....	20
2. Pemerintahan Sentralistik.....	22
E. Ruang Lingkup Penelitian	30
F. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Unit Analisis	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
4. Observasi.....	33

5. Wawancara.....	34
6. Dokumentasi.....	34
7. Teknik Analisis Data.....	36
BAB II GAMBARAN UMUM MUNICIPIO MANUFAHI.....	37
A. Sejarah Municipio Manufahi.....	37
B. Kondisi Geografi.....	39
1. Luas Wilayah.....	39
2. Batas Wilayah.....	39
C. Demografi.....	40
1. Jumlah Penduduk.....	40
2. Mobilisasi Penduduk.....	41
3. Jumlah Penduduk Menurut Posto Administrativo.....	42
4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	43
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	44
6. Mata Pencaharian.....	45
7. Organisasi Politik.....	46
8. Non-Government Organization (NGO).....	47
9. Budaya.....	48
10. Bahasa.....	49
D. Prasarana.....	50
1. Prasarana Perhubungan/infrastruktur.....	51
2. Prasarana Listrik.....	51
3. Prasarana Telekomunikasi.....	52
5. Prasarana Pendidikan.....	53
4. Prasarana Kesehatan.....	54

E. Sosial Ekonomi.....	55
1. Kondisi Sosial.....	55
2. Kondisi Ekonomi.....	56
F. Pemerintahan.....	58
 BAB III Analisis Data Kapasitas Birokrat Lokal	
Pemerintah Municipio.....	60
A. Deskripsi Informan.....	60
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Umur.....	61
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan.....	61
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
B. Analisis Kapasitas Birokrat Lokal Pemerintah Municipio.....	63
1. Produktivitas.....	63
2. Moralitas.....	66
3. Keluwesan.....	69
4. Efektivitas Birokrat.....	71
5. Tingkat Pendidikan Staf.....	74
6. Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan Yang Dimiliki.....	75
7. Penguasaan Terhadap Pekerjaan dan peralatan.....	77
8. Daya Inovasi Birokrat.....	78
9. Daya Kreasi Birokrat.....	80
 BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

INTERVIEW GUIDE

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas wilayah, jumlah sukus, dan aldeias berdasarkan posto administrativo.....	39
Tabel II.2 Komposisi penduduk menurut umur.....	40
Tabel II.3 Penduduk dari daerah lain yang menetap di municipio manufahi.....	41
Tabel II.4 Komposisi Penduduk Menurut Posto Administrativo.....	42
Tabel II.5 Komposisi Penduduk Menurut jenis kelamin.....	43
Tabel II.6 Komposisi Penduduk Menurut Agama.....	44
Tabel II.7 Mata Pencaharian Kepala Keluarga Berdasarkan Posto Administrativo.....	45
Tabel II.8 Partai politik.....	46
Tabel II.9 Non-government organization.....	47
Tabel II.10 Prasarana Infrastruktur.....	50
Tabel II.11 Prasarana Listrik.....	51
Tabel II.12 Prasarana Pendidikan.....	53
Tabel II.13 Prasarana Kesehatan.....	54
Tabel II.14 Jaminan Sosial.....	56
Tabel II.15 produksi makanan pertanian dimunicipio manufahi.....	57
Tabel II.16 Tingkat Pendidikan birokrat pemerintah.....	58
Tabel III.17Kelompok Umur.....	60
Tabel III.18 Jabatan/pekerjaan.....	61
Tabel III.19 Tingkat Pendidikan informan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar.II. budaya.....	49
Gambar.II. prasarana listrik.....	52
Gambar.II. prasarana telekomunikasi.....	53
Gambar.II. prasarana kesehatan.....	55
Gambar.III.Kantor municipio manufahi.....	66
Gambar.III.prasarana kesehatan.....	74
Gambar.III.antrian di bank bnctl.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama konflik horizontal atau perang saudara yang telah terjadi di Timor Leste menimbulkan perpecahan antara masyarakat yang memiliki pandangan politik atau ideologi yang berbeda-beda antara partai-partai politik pada masa itu. Ada beberapa partai politik seperti *Udt*, *Apodeti* yang ingin integrasi ke negara lain, namun pada saat itu *Fretilin* merupakan partai politik yang didukung oleh mayoritas masyarakat Timor Leste menolak untuk integrasi (penyatuan). Salah satunya adalah perbedaan kultur/budaya menjadi prinsip dasar masyarakat Timor Leste tidak ingin integrasi dengan negara lain.

Fretilin merupakan partai politik yang mempertahankan ideologinya. Fretilin ingin merdeka dan ingin membentuk sebuah negara yang berdaulat dan telah mendapatkan dukungan mayoritas secara penuh dari masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu pada tanggal 28 November 1975 adalah hari bersejarah bagi masyarakat Timor Leste walaupun dalam masa transisi kemerdekaan (antara pro dan kontra) tetapi dengan kekuatan partai Fretilin pada saat itu. Fretilin memproklamasikan kemerdekaan menjadi sebuah Negara Republik Demokratik Timor Leste. Proklamasi kemerdekaan itu membentuk suatu pemerintah yang menggunakan sistem semi presidensial yang dipimpin oleh Presiden dan Perdana Menteri.

Sejarahnya paska proklamasi kemerdekaan pada tanggal 28 november 1975 masih terdapat pro dan kontra antara elit politik dan dalam kubu militarisme. dinamika politik yang terus berkejolak baik di internal maupun esternal, telah

menjadi suatu perhatian di pihak luar. Dengan ideologi yang digunakan Fretilin adalah paham marxisme, seperti yang diklaim oleh Amerika Serikat.

Masa penjajahan telah melahirkan budaya dan nilai lain oleh pemerintah kolonial. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) atau kecurigaan, keinginan untuk mempertahankan kekuasaan membuat pemerintah kolonial mengembangkan *distrust* di dalam maupun di luar pemerintah. Sehingga menimbulkan konflik horizontal berkepanjangan. Konflik yang telah terjadi, membuat masyarakat menyikapi perbedaan pandangan politik atau paham yang telah lama lahir di lingkungan masyarakat, yang meyakinkan proklamasi kemerdekaan pada waktu itu. Sistem politik yang dilakukan kolonial sering menimbulkan konflik ideologi yang merupakan akibat adanya perbedaan paham politik diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang, dimana perbedaan paham politik yang dijadikan pedoman dalam mencapai suatu kekuasaan dalam masyarakat.

Setelah diakui oleh masyarakat Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Leste melakukan restorasi kemerdekaan menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang memiliki Konstitusi Tahun 2002.

Konstitusi Tahun 2002 Prinsip Dasar Negara Pasal 1 (Republik) ayat 1 mengatakan bahwa Negara Republik Demokratik Timor Leste adalah negara demokratik hak kedaulatan negara merdeka dan bersatu berdasarkan kehendak rakyat dan menghormati martabat manusia.

Konstitusi Pasal 6 Tujuan Negara Tahun 2002 mengatakan:

- a) Untuk mempertahankan dan menjamin kedaulatan negara
- b) Jaminan dan mempromosikan hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum yang demokratik.
- c) Untuk mempertahankan dan menjamin demokrasi politik dan partisipasi rakyat dalam resolusi masalah nasional.
- d) Memastikan pembangunan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e) Untuk mempromosikan pembangunan masyarakat berdasarkan keadilan sosial, menciptakan kesejahteraan material dan spiritual warga.
- f) Untuk melindungi lingkungan dan melestarikan sumber daya alam
- g) Untuk menegaskan dan menghargai kepribadian dan warisan budaya rakyat Timor Leste
- h) Untuk mempromosikan pembentukan dan pengembangan hubungan persahabatan dan kerja sama di antara semua bangsa dan negara.
- i) Untuk mempromosikan pembangunan yang harmonis dan terpadu dari sektor dan wilayah dan adil distribusi produk nasional;
- J) Untuk mempromosikan dan menjamin kesetaraan yang efektif antara perempuan dan laki-laki

Berdasarkan Konstitusi Pasal 1 dan Pasal 6 Tahun 2002 secara jelas kedaulatan dan kemerdekaan negara Timor Leste tidak dapat diganggu gugat lagi baik oleh internal maupun eksternal. Sebagai negara yang berdaulat yang mempunyai aturan hukum dalam konteks sistem pemerintah semi presidensial. Sebagai negara yang baru merdeka urusan sistem politik baik dalam negeri maupun luar negeri dan hubungan bilateral maupun multilateral berjalan sangat baik. Sistem politik yang dijalankan dalam roda pemerintahan semuanya diperuntukan demi kesejahteraan masyarakat.

Selama kurang waktu satu dasawarsa lebih (14 tahun) kemerdekaan negara Timor Leste dalam praktik penyelenggaraan pemerintah bersifat sentralistik, dapat dikatakan bahwa mempertahankan status quo pada sistem pemerintah yang dulu pada tahun 1975. Sentralistik yang dijalankan oleh pemerintah semenjak awal sampai dengan saat ini telah mampu membawa pemerintah dalam kedaulatan politik. Sistem Pemerintahan yang bersifat sentralistik diterapkan secara struktural birokrat mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat desa. Secara realitas dengan sistem sentralistik yang diterapkan ini secara nyata pemerintah lokal sangat mengalami ketergantungan pada pemerintah sentral (pusat). Sehingga dalam menjalankan pemerintah baik pembangunan, dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat masih tergantung pada pusat.

Negara dalam menjalankan otoritasnya dengan sistem sentralistik memperkuat posisi intervensinya terhadap pemerintahan lokal. Sehingga pemerintah lokal tidak bisa buat apa-apa hanya menunggu perintah dari atas lazim di bahasakan di Timor Leste "*hein manda husi leten*".

Kekuasaan yang secara terpusat maka semua urusan pemerintahan termasuk wewenangnya dijalankan pemerintah pusat, pemerintahan lokal hanya berperan sebagai pelaksana operasional saja karena kebijakan yang dilakukan secara terpusat.

Pada umumnya semua bentuk pemerintahan sifat yang sama, yaitu kewenangan untuk membuat hukum atau peraturan, serta kekuasaan untuk memaksa semua pilar agar mentaati hukum dan peraturan tersebut. demikian pula tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan sentralistik dipengaruhi oleh tata nilai yang dianut berupa cita-cita tujuan bernegara, atau Konstitusi Negara yang telah mengatur sistem dan kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat, serta perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi baik dalam tataran nasional maupun internasional, untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum di dalam mana warga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar, pada hakekatnya adalah pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Permasalahan yang dialami oleh pemerintahan saat ini adalah ketidakmampuan birokrat pemerintah lokal dalam mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat, baik pelayanan publik maupun pembangunan membuat pemerintah tidak efisien dan efektif.

Pertama program (proyek) pembangunan sarana prasarana maupun pelayanan yang dijalankan di lokal tidak kena sasaran pada masyarakat, karena perumusan kebijakan secara terpusat, adanya kooptasi dan korporasi dari pemerintah pusat menentukan jabatan-jabatan birokrat lokal bukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki tetapi intervensi politik yang terlalu besar dari atas ke bawah, oleh karena itu indikasi birokrat dalam menjalankan tugas tidak

efektif efisien, tidak tanggung jawab dan responsif, Sementara masyarakat lokal sendiri adalah penonton yang menyaksikan serangkaian atraksi para politisi di atas panggung kekuasaan.

Kedua pelayanan umum dari birokrat pemerintahan tidak efektif pelayanan pada masyarakat seperti urus kartu tanda penduduk atau dokumen lainnya, faktor penyebabnya adalah karena kurangnya fasilitas umum seperti infrastruktur atau sarana prasarana, dan intervensi yang terlalu besar dari pusat menciptakan dinamika politik dalam birokrat lokal cenderung melayani penguasa dari pada melayani masyarakat.

Ketiga kemampuan sumber daya manusia yang tidak mendukung bisa melihat dari kualitas birokrat lokal, secara kualitas birokrat lokal belum mampu dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di pemerintah lokal, karena kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, hal ini ditandai dengan ketidakmampuan pegawai birokrat memberikan solusi kepada konsumen (masyarakat) sehingga dikenal pegawai birokrasi mengambil tindakan yang disebut dengan tindakan diskresi.

Keempat budaya ketergantungan (*dependency culture*) masyarakat lokal terlalu besar pada pemerintahan (negara) budaya yang muncul sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan tentang jaminan kesejahteraan, yang secara efektif membebaskan seluruh kebutuhan kelas populasi untuk bekerja dan mendorong sikap ketergantungan kepada lembaga-lembaga negara, istilah ini biasanya dimaksudkan dalam makna yang buruk, rasa tanggungjawab terhadap kehidupan mereka sendiri menjadi mati, berkurangnya inisiatif masyarakat dan keberanian mengambil resiko dan proses normal untuk membangun sebuah

rumah dan keluarga diabaikan karena kesenangan yang murah dan mudah diperoleh.

Kelima dominasi dan intervensi golongan atau kelompok kepentingan tertentu telah membutuhkan birokrat untuk selalu memomorsatukan pelayanan publik banyak kejadian yang meletakkan kepentingan golongan atau kelompok lebih didahulukan dari pada kepentingan negara ini. Alhasil pelayanan yang lama disertai dengan berbagai pungutan liar.

Kapasitas birokrat pemerintah lokal sebagai faktor kunci terhadap proses perubahan yang meliputi segenap aspek baik itu sosial budaya, politik, ekonomi, dan manajemen organisasi, birokrat menjadi penentu utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan maupun pembangunan yang hakekat sesungguhnya adalah untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan mulia dari birokrasi, diperlukan kiranya birokrat pemerintah lokal yang handal dan cetakan dalam menangkap kebutuhan jaman yang semakin kompleks dewasa ini, birokrat lokal yang mempunyai kejujuran, bisa menjadi suri tauladan bagi publik, memiliki kesadaran dan ketulusan untuk mengabdikan dan membela kepentingan publik, memiliki kapasitas intelektual, keterampilan, dan penguasaan teknologi, Sejumlah tuntutan kemampuan tersebut merupakan kebutuhan dalam sumber daya manusia (SDM) birokrat pemerintah di tingkat lokal.

Birokrat lokal harus memiliki kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas, daerah akan membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang beragam sesuai dengan potensi sumber daya alamnya, dapat menjadi pusat keunggulan apabila birokrat mampu memberikan nilai tambah terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat, keberadaan birokrat publik harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan kemampuan yang dimiliki.

Birokrat pemerintah merupakan unjuk tombak baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maupun pembangunan, dilihat dari peran dan fungsi yang dilakukan tersebut. Birokrat dituntut dapat menjadi sosok lembaga yang akomodatif dan responsif terhadap tuntutan lokal maupun global, bertolak dari kenyataan ini maka efisiensi, produktivitas dan kinerja birokrat secara keseluruhan menjadi komponen vital dan mendesak untuk diperjuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Dwiyanto 2015 Reformasi Birokrasi Kontekstual Penerbit Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI Yogyakarta.

Ambar Teguh Sulistiyani 2011 Memahami Good Governance, Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia Penerbit Gava Media Yogyakarta.

Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto. 2009 Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Penerbit Gava Media Yogyakarta.

Delly Mustafa, 2014 Birokrasi Pemerintahan Penerbit Alfabeta, Bandung.

Djam'an Satori Dan Aan Komariah, 2013. Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Alfabeta, Cv Bandung.

H. Abd. Halim, 2014 Politik Lokal Penerbit Lp2b (lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa) Yogyakarta.

H. Inu Kencana Syafii, 2013 Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua Penerbit Cv. Mandar Maju Bandung.

Penny Kusumastuti Lukito, 2014 Membumikan Tranparansi Dan Akuntabilitas. Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan Penerbit Pt Grasindo Anggota Ikapi, Jakarta.

Roger Scruton 2013 Kamus Politik Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Soetomo 2013 Strategi Pembangunan Masyarakat Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Sudarmanto, Cetakan Pertama 2009. Cetakan Ketiga 2015. Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerbit Pustaka Pelajar yogyakarta.

Utang Rossidin, 2015 Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Penerbit Cv Pustaka Setia Bandung.

SUMBER LAIN:

Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste 2002

[Http://timor-leste.gov.tl/?lang=en](http://timor-leste.gov.tl/?lang=en)

<https://wijayalabs.wordpress.com/2008/06/23/profesi-pendidikan-keahlian-teknologi-pendidikan/>

<http://skripsi-manajemen.blogspot.co.id/2011/02/pengertian-pengalaman-kerja.html>